

**WKEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI
SENGKETA EKONOMI SYARIAH SETELAH KELUARNYA
PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

SITI UMI AIMANAH
C100140148

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA
EKONOMI SYARIAH SETELAH KELUARNYA
PUTUSAN MK No.93/PUU-X/2012**

PUBLIKASI ILMIAH

Disusun Oleh:

SITI UMI AIMANAH

C.100.140.148

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Wardah Yuspin S.H., M.Kn., Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI
SENGKETA EKONOMI SYARIAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MK No. 93/PUU-X/2012**

Yang ditulis oleh :

SITI UMI AIMANAH

C100140148




Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jum'at, 6 April 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

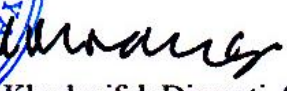
Ketua	:	Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D	()
		(Ketua Dewan Penguji)	
Sekretaris	:	Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.	()
		(Anggota I Dewan Penguji)	
Anggota	:	Nuswardhani, S.H., SU	()
		(Anggota II Dewan Penguji)	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum) -

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 April 2018

Penulis



Siti Umi Aimanah
C100140148

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI
SENGKETA EKONOMI SYARIAH SETELAH KELUARNYA
PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama setelah Putusan MK No.93/PUU/2012 dan setelah adanya Putusan MK No.93/PUU/2012 masih ada yang memasukkan berkas sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Negeri. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan jenis data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama setelah keluarnya Putusan Mk No.93/Puu-X/2012, dimana berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa perkara sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikannya. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri diperbolehkan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka terjadi dualisme kewenangan mengadili, kemudian berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Alasan masyarakat masih menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah adalah menganggap Pengadilan Agama hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian dan warisan, belum tahu tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, proses penyelesaian di Pengadilan Negeri lebih mudah dan biaya yang murah, masyarakat yang sudah mempercayai Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa Perdata, serta Penggugat beragama Non Islam.

Kata Kunci: kewenangan, pengadilan agama, sengketa ekonomi syariah

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the settlement of dispute of sharia economy in Religious Court after Decision of MK No.93/PUU/2012 and to know after the existence of Decision of MK No.93/PUU/2012 there is still include file of sharia economic dispute in State Court. Research method through empirical juridical approach which is descriptive with data type consist of primary data that is interview and secondary data that is library. Methods of data collection by interview and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results showed that the settlement of the sharia economic dispute in the Religious Court after the issuance of Decision MK No.93/PUU-X/2012, which under Law No. 3 of 2006 states that the sharia economic dispute case is the absolute competence of the

Religious Courts that have the authority to solve it. However, based on Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking which states that the District Court is allowed to solve the sharia economic case, there is dualism of authority to judge, then based on Decision of the Constitutional Court. 93/PUU-X/2012 sharia economic dispute is the authority of the Religious Courts. The reason people still use the District Court to solve the problems of sharia economy is to consider the Religious Courts only used to solve the problem of divorce and inheritance, not knowing about the authority of the Religious Courts in solving the dispute sharia economy, the settlement process in the District Court easier and cheaper, already trusting the District Court in handling Civil Disputes, as well as Non-Muslim Plaintiffs.

Keywords: authority, religious court, sharia economic dispute

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan ini tidak hanya pada lembaga perbankan saja melainkan lembaga keuangan non bank. Berkembangnya kegiatan ekonomi syariah ini memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa antara pihak dalam perkara ekonomi syariah. Maka diperlukan payung hukum untuk mengaturnya. Hal ini dimaksud agar tidak membingungkan bagi para pihak pencari keadilan untuk menyelesaikannya. Untuk itu, dalam system penyelesaian sengketa ekonomi syariah diperlukan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Perbankan syari'ah sebagai salah satu system perbankan nasional diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syari'ah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.¹ Di antara Bank Syariah dengan nasabahnya terdapat suatu hubungan hukum yang erat sekali yang juga menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, seperti hak nasabah Bank Syariah untuk dijamin dana simpanannya di Bank Syariah aman dan tidak hilang, serta kewajiban Bank Syariah untuk memenuhi perjanjian atau akad yang telah disepakati bersama. H.R. Daeng Naja menjelaskan bahwa: "Hubungan hukum antara Bank Syariah dengan

¹Renny Supriyati B, 2016, *Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal.1

nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Dengan demikian, apabila telah terjadi hubungan antara nasabah dengan bank maka menurut hukum perikatan Indonesia, perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar perjanjian atau kontrak, atau akad.²

Apabila di kemudian hari timbul persengketaan antara Bank Syariah dengan nasabahnya, maka berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan pada Pasal 55 ayat-ayatnya, sebagai berikut: (1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*; (2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad*; dan (3) *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah*.³

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2). Menurut Pasal 55 ayat (1) secara jelas ditentukan kompetensi atau yurisdiksi pengadilan pada Peradilan Agama, sedangkan pada Pasal 55 ayat (2) membuka peluang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, seperti di Pengadilan Negeri. Adanya dua lembaga peradilan dengan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan persengketaan tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara No. 93/PUU-X/2012.⁴ Sengketa Perbankan Syariah adalah domain dari Pengadilan Agama. Dalam kaitan dengan ketentuan Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dengan nasabahnya ditempuh dan diselesaikan melalui Peradilan Agama, dan penyelesaian di luar peradilan seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan serta Arbitrase

²H.R. Daeng Naja, 2011, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, hal. 59

³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (Pasal 55)

⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara No. 93/PUUX/2012.

Syariah yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵

Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang timbul karena masalah sengketa ekonomi syariah masih banyak yang diserahkan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengadakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama setelah Putusan MK No.93/PUU/2012 dan untuk mengetahui setelah adanya Putusan MK No.93/PUU/2012 masih ada yang memasukkan berkas sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Negeri. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: (1) Manfaat Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dibidang hukum, khususnya hukum perdata tentang kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah, (2) Manfaat Praktis, (a) Untuk lebih mengembangkan penalaran, pembentukan pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; (b) Untuk dapat dijadikan masukan bagi masyarakat tentang kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari'ah.

2. METODE

Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan kewenangan sengketa ekonomi syari'ah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan penerapan peraturan yang ada.

Jenis data menggunakan (1) Data primer, yaitu fakta atau keterangan yang berkaitan dengan sumber data yang bersangkutan, yang berasal dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama; (2) Data sekunder, antara lain

⁵Ahmad Mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.133

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶

Metode pengumpulan data melalui (1) Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti; (2) Studi lapangan, yakni dilakukan dengan cara wawancara dan pengambilan data dalam hal ini dilakukan dengan wawancara pada petugas di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menerapkan analisis secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. maksudnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar dan sistematis sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Setelah Keluarnya Putusan Mk NO.93/PUU-X/2012

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah.

Kemudian perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 antara lain memberikan perluasan kewenangan Pengadilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.30

⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.172

orang yang beragama Islam di bidang:(a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah.

Dengan adanya muatan ekonomi syariah dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi Pengadilan Agama dan pengadilan lain tidak lagi berwenang memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan pada Pasal 55 ayat-ayatnya, sebagai berikut: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; dan (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.⁸

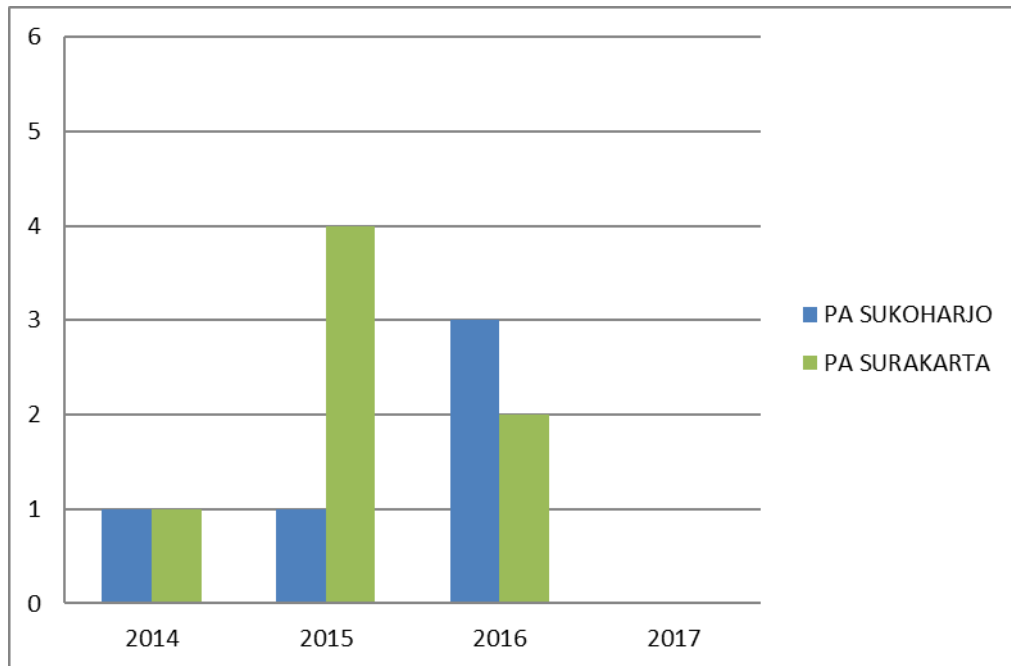
Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2). Menurut Pasal 55 ayat (1) secara jelas ditentukan kompetensi atau yurisdiksi pengadilan pada Peradilan Agama, sedangkan pada Pasal 55 ayat (2) membuka peluang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, seperti di Pengadilan Negeri. Adanya dua lembaga peradilan dengan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan persengketaan tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara No. 93/PUU-X/2012.⁹ Sengketa Perbankan Syariah adalah domain dari Pengadilan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah memperkuat dan mempertegas bahwa Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah, seperti yang tercermin di

⁸Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (Pasal 55)

⁹Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara No. 93/PUU-X/2012.

Kabupaten Sukoharjo dan di Kotamadya Surakarta hal tersebut sudah tercermin, dari hasil penelitian yang dilakukan dikedua daerah tersebut diperoleh data sebagai berikut :



Gambar 1. Grafik jumlah perkara ekonomi syari'ah di PA

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sukoharjo bisa dikatakan masih sangat sedikit, karena pada tahun 2014 hanya ada satu kasus perkara ekonomi syari'ah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sukoharjo. Pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Surakarta hanya ada satu perkara ekonomi syari'ah yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2015 hanya ada satu perkara ekonomi syari'ah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sukoharjo, akan tetapi di Pengadilan Agama Surakarta ada empat perkara ekonomi syari'ah yang diselesaikan. Pada tahun 2016 ada tiga perkara ekonomi syari'ah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan di Pengadilan Agama Surakarta hanya ada dua perkara ekonomi syari'ah yang diselesaikan. Pada tahun 2017 tidak ada satupun perkara ekonomi syari'ah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Agama Surakarta.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa jumlah perkara ekonomi syari'ah pada tahun 2014 sampai tahun 2016 di Pengadilan Agama Sukoharjo mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pada tahun 2014 sampai 2016 perkara ekonomi syari'ah jumlah perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surakarta mengalami naik turun yang pada tahun 2014 ada satu perkara, tahun 2015 ada empat perkara, dan pada tahun 2016 ada dua perkara ekonomi syari'ah. Namun pada tahun 2017 tidak ada perkara ekonomi syari'ah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sukoharjo, dan Pengadilan Agama Surakarta.

Berdasarkan grafik jumlah perkara ekonomi syari'ah PA di Kabupaten Sukoharjo dan Kotamadya Surakarta yang menyatakan jumlah perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama di kedua wilayah tersebut mengalami kenaikan yang signifikan, dengan demikian masyarakat atau pelaku ekonomi syariah sudah melek hukum dan mengetahui peraturan yang sudah ada.

Sehingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa masalah sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya dan Putusan MK No.93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menjadi Kewenangan Pengadilan Agama sudah sesuai yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara yang diterapkan dalam menangani perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah di lingkungan Peradilan Agama sama dalam ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.¹⁰

Prosedur/mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama yaitu (a) tahap penyelesaian melalui perdamaian, (b) tahap pembacaan gugatan, (c) tahap jawab-menjawab (replik-duplik), (d) tahap

¹⁰Makmun, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 14 Februari 2018, pukul 14:30 WIB

pembuktian, (e) tahap kesimpulan, (f) tahap musyawarah majelis, (g) tahap pengucapan putusan.

3.2 Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Negeri dan Agama Setelah Putusan MK NO. 93 / PUU-X / 2012

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dapat ditempuh dan diselesaikan melalui Peradilan Agama, dan penyelesaian di luar peradilan seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan serta Arbitrase Syariah yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, permasalahan akan muncul ketika ada dualisme kewenangan mengadili sengketa tersebut.

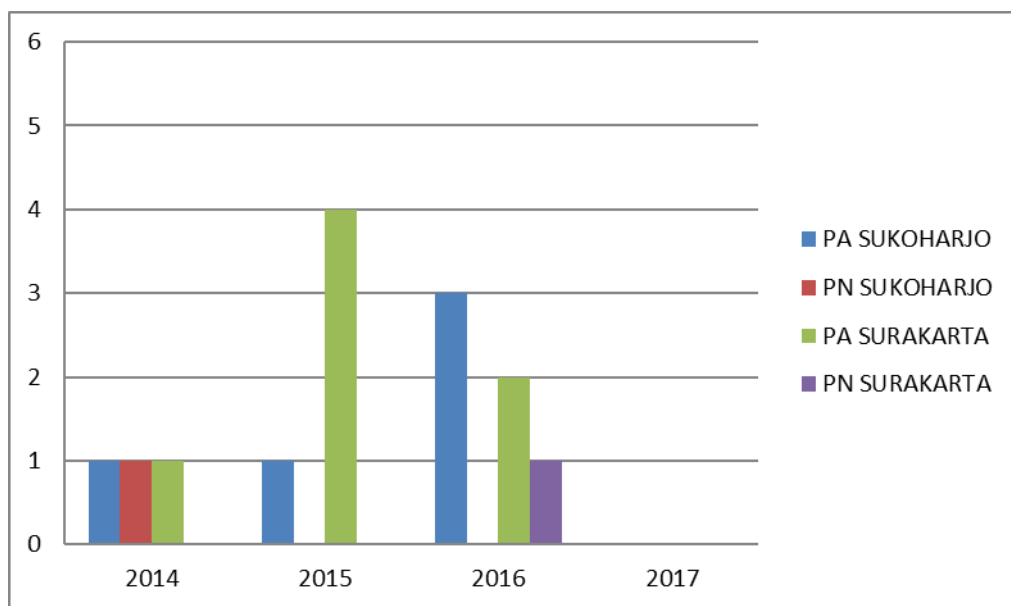
Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan pada Pasal 55 ayat-ayatnya, sebagai berikut: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; dan (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2). Menurut Pasal 55 ayat (1) secara jelas ditentukan kompetensi atau yurisdiksi pengadilan pada Peradilan Agama, sedangkan pada Pasal 55 ayat (2) membuka peluang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, seperti di Pengadilan Negeri.

Adanya dua lembaga peradilan dengan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan persengketaan tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat. Kemudian Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi

berdasarkan Putusan Perkara No. 93/PUU-X/2012, Sengketa Perbankan Syariah adalah domain dari Pengadilan Agama.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah memperkuat dan mempertegas bahwa Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah, akan tetapi di Kabupaten Sukoharjo dan di Kotamadya Surakarta hal tersebut tidaklah tercermin, dari hasil penelitian yang dilakukan di kedua daerah tersebut diperoleh data sebagai berikut :



Gambar 2. Grafik perkara ekonomi syariah di PA dan PN

Grafik diatas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dapat diselesaikan Pengadilan Agama Sukoharjo dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak lima perkara. Kemudian jumlah perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak tujuh perkara. Akan tetapi pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Surakarta masih ada perkara ekonomi syariah yang diterimanya.

Meskipun, berdasarkan Putusan Perkara No. 93/PUU-X/2012, bahwa Pengadilan Agama sebagai pemegang kompetensi absolute dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, akan tetapi di Kabupaten Sukoharjo

dan di Kotamadya Surakarta masih ada beberapa pihak yang mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 10 orang yang ada di wilayah Mojolaban bahwa, adanya anggapan masyarakat bahwa menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat umum menganggap bahwa Pengadilan Agama hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian dan warisan.

Anggapan masyarakat umum yang begitu menyebabkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak bisa dilakukan di Pengadilan Agama, dengan demikian masyarakat memandang bahwa Pengadilan Negeri yang bisa menyelesaikannya.

- 2) Masyarakat umum belum begitu tahu tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum menyebabkan masyarakat buta akan peraturan yang ada di dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sehingga masyarakat tidak tahu akan kewenangan Pengadilan Agama.

- 3) Proses penyelesaian di Pengadilan Negeri lebih mudah dan biaya yang murah.

- a) Masyarakat yang sudah mempercayai Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa Perdata.

- b) Penggugat beragama Non Islam.

Seperti Putusan No.47/Pdt.G/2014/PN Skh, sebagai Pihak Penggugat yaitu Nanang Hermawan Wijaya,SE,M dan sebagai Pihak Tergugat yaitu PT. Bank Mega Syariah, berdasarkan Akta Pembiayaan Murabahah no.10 tertanggal 13 Januari 2012 yang dibuat Danang Prasajo,SH notaris/PPAT Sukoharjo yang didalam akta tersebut terdapat adanya perjanjiannya yang memuat klausul penyelesaian antar pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat, secara mediasi, menyelesaikan melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas). Sehingga didalam Putusan menyatakan

bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena di dalam akad pembiayaan Murabahah yang sudah disepakati tersebut menjadi kewenangan badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas). Sehingga Putusan tersebut ditolak.

Menurut penulis, masyarakat yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus mencermati dahulu tentang duduk perkara yang akan diselesaikan, harus mengetahui kompetensi *absolute* (kewenangan mengadili), harus memperhatikan peraturan yang ada sehingga putusan itu ditolak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Setelah Keluarnya Putusan Mk No.93/Puu-X/2012. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa perkara sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikannya. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri diperbolehkan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Adanya dualisme kewenangan mengadili. Kemudian berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dapat diselesaikan Pengadilan Agama Sukoharjo dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak lima perkara. Kemudian jumlah perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak tujuh perkara.

Kedua, alasan masyarakat bahwa menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah adalah (1) Masyarakat umum menganggap bahwa Pengadilan Agama hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian dan warisan; (2) Masyarakat umum belum begitu tahu tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah; (3) Proses penyelesaian di Pengadilan Negeri lebih mudah dan biaya yang murah; (4) Masyarakat yang sudah mempercayai

Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa Perdata; dan (5) Penggugat beragama Non Islam.

4.2 Saran

Pertama, kepada masyarakat atau nasabah bank, apabila ingin mengajukan pinjaman modal kepada Bank harus memperhatikan isi akad perjanjian yang sudah di buat oleh notaris atau PPAT terlebih dahulu, sehingga paham akan isi yang telah mereka sepakati dan apabila terjadi wanprestasi masyarakat atau nasabah dapat melakukan penyelesaian masalah sesuai dengan isi akad perjanjian. Sehingga dapat meminimalisir sengketa ekonomi syariah dan tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Kedua, kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar sadar akan hukum dan paham akan peraturan yang ada.

PERSANTUNAN

Naskah publikasi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil. Saudara-saudarku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B, Renny Suprinyatni. 2016. *Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Naja, H.R. Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara No. 93/PUUX/2012.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (Pasal 55)